

Kamis, 12 November 2015, 04:27 WIB

# Menkeu Minta Dosen Diprioritaskan Ikut LPDP

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Hazliansyah



Republika/ Tahta Aidilla

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) memberikan paparan saat mengikuti Seminar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengedapankan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kepada dosen. Menkeu menilai alokasi anggaran untuk dosen saat ini terlalu tinggi sehingga cukup membebani anggaran.

LPDP sendiri merupakan sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN.

"Ini ganggu alokasi Dikti. Kami tak sepatutnya dengan Menristek Dikti memasukan anggaran terlalu banyak untuk dosen. *Kan* ada LPDP S2, S3 ke luar negeri!" kata Bambang saat mengisi acara seminar tentang

## TERPOPULER TERKOMENTARI



12 November  
Diperingati Sebagai Hari Ayah Nasional, Begini Sejarahnya



Musibah Dokter PTT di RS Cendrawasih Dobo



Sulit Dievakuasi, Dokter PTT Meninggal di Kepulauan Aru



Skandal Tender Alat Olahraga di Kemenpora (Bagian 1)



Den Haag: Mengingat 1965, Melupakan Westerling!

## SELENGKAPNYA

Kamis, 12 Nov 2015  
08:36:45

JAKARTA ▼

republika.co.id

# ZUHUR

11:40:15

<iframe src="http://www.republika.co.id/jadwal-s

EMBE

## FOTO



**NEWS** EKONOMI SEPAKBOLA KHAZANAH OTO-TEK LEISURE INPICTURE VIDEO PUBLIKA ENGLISH INDEKS

**NASIONAL** INTERNASIONAL OLAHRAGA PENDIDIKAN BADAN POM

Buruh

8 tidak membuat terlalu banyak alokasi anggaran ke dosen. Ia meminta Dikti agar mewajibkan dosen ikut LPDP sehingga dosen terbiasa

bersaing.

"Karena LPDP itu intinya bersaing dan harus masuk universitas yang tergolong bagus. Saya pikir, tidak ada salahnya kalau kita punya dosen yang berkualitas," ujar Bambang.

Menurutnya, dengan LPDP, pola penganggaran jadi lebih baik. Karena apabila menggunakan sistem Dikti sering terjadi overlapping anggaran.

"Kalau LPDP tidak. Karena kita tidak ikut sistem anggaran. Itu dikelola secara otonom. Jadi kami sudah bilang ke Menristek Dikti, lebih baik program Bapak sama LPDP itu digabung," ucap Bambang.

203  
SHARE

f 195

t 8

g+ 0

Mail

Copy

1  
KOMENTAR

TAG

#bambang brodjonegoro

#lembaga pengelola dana pendidikan

### BERITA TERKAIT

Finance Minister forecasts 4.8 percent growth

Rokok Kretek Tangan tidak Kena Kenaikan Tarif Cukai

Tarif Cukai Rata-Rata Naik 11 Persen Tahun Depan

Menkeu: Komisi XI DPR Bisa Menolak Pencairan Dana PMN

Minister confirms increase in excise on cigarettes

### BERITA LAINNYA



HUKUM

5 detik yang lalu

**Komnas HAM Percaya Pemerintah Indonesia Bisa Selesaikan Kasus 1965**



NATIONAL POLITICS

3 menit yang lalu

**Ambassador: Ambon can be developed as a hub port**

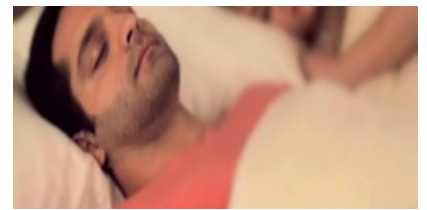


LIGA ITALIA

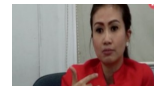
3 menit yang lalu

**Duo Serigala Kembali**

### VIDEO



**'Tidur Bareng Nora Bisa Hentikan Mendengkur Lho'**



Merasa Tertampar, Any Dirikan Yayasan Tri Kusuma Bangsa



Langkah Antisipasi Banjir Sebagai 'Tamu tak Diundang'